

**EVALUASI TAHAPAN INTERVENSI SOSIAL PADA KELOMPOK  
NELAYAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN  
TANGKAP DI DUKUH TAMBAKREJO KOTA SEMARANG**

Oleh:

Senoaji Yuda Raharjo, Titik Djumiarti S.Sos, M.Si

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research is aimed to identify the shape of a given social interventions and evaluate the stages of social intervention in order to obtain good performance of program and to identify whether there is result of the implementation of social interventions provided by Department of Marine Affairs and Fisheries Semarang through Fisheries Development Program in Tambakrejo Hamlet, Semarang. This research is a qualitative descriptive study with data collection through interviews and documentation. Informants were selected by researcher is employees of Department of Marine Affairs and Fisheries Semarang and fishermen communities in Tambakrejo Hamlet, Semarang. In this study, researcher used a phase of social interventions to see if the social intervention provided is in accordance with the stages of implementation and use phases of policy evaluation. The results showed that social interventions provided by Department of Marine Affairs and Fisheries Semarang has been running well and in conformity with the implementation phase. Results of the administration of the social intervention is fishermen awareness to use environmental friendly fishing gear, fishermen awareness of safety at sea, fishermen skill enhancement, and increasing fish catches. But the intervention provided also still has shortcomings, that is in terms of the implementation stages, the data collection phase, the contract negotiation phase, and termination phase. Termination stage or termination of intervention activities can not be done, it is because a given social intervention has not been fully able to resolve all problems in Tambakrejo Hamlet, Semarang. Furthermore, supervision and sanctions toward fishermen who still use dangerous fishing gear has not given explicitly. Social interventions is still not fully utilized by some fishermen. The advices can be given by researcher is to raise awareness to protect the environment, involving collaboration with the private sector, eliminating the lazy attitude of fishermen, apply strict supervision and sanctions to fishermen who commit violation. While the advice can be given to other researchers that will research the social intervention in order to pay attention to the excavation problems stage and establishing a system of action. Due to give an intervention need to be excavated and the main problems involve other parties for the implementation of a given intervention can run well.*

*Keyword : social intervention, development program of capture fisheries, empowerment*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Dengan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, tentunya banyak sekali potensi yang dimiliki negara Indonesia. Salah satu potensi yang paling terkenal yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah potensi kelautan dan pesisir. Potensi laut di Indonesia diantaranya yaitu banyaknya jenis ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain sebagainya. Dari sisi sosial ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir terlihat tidak mampu terangkat. Banyak dari mereka masih berkuat dengan kemiskinan yang selama ini mereka hadapi. Oleh karena itu, masyarakat nelayan ini sangat perlu dibantu oleh pihak – pihak terkait agar mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Bantuan tersebut dapat berbentuk intervensi sosial dari pihak – pihak tertentu kepada kelompok – kelompok yang membutuhkan. Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu meliputi Kecamatan Tugu (Bagian Wilayah Kota X), Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara (Bagian Wilayah Kota III), serta Kecamatan Genuk (Bagian Wilayah Kota IV). Dengan wilayah pesisir yang cukup luas, maka tidak mengherankan jika banyak masyarakat di Kota Semarang yang

menggantungkan hidupnya untuk bekerja di laut. Adapun data mengenai nelayan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data nelayan, Petani Tambak, dan Petani Kolam Kota Semarang Tahun 2015

No	Kecamatan	Nelayan	Petani Tambak	Petani Kolam
1.	Banyumanik	-	-	14
2.	Candisari	-	-	-
3.	Gajah Mungkur	-	-	--
4.	Gayamsari	-	-	10
5.	Genuk	38	-	32
6.	Gunungpati	-	-	185
7.	Mijen	-	-	120
8.	Ngaliyan	-	-	42
9.	Pedurungan	-	-	74
10.	Semarang Barat	49	32	77
11.	Semarang Selatan	-	-	24
12.	Semarang Tengah	-	-	-
13.	Semarang Timur	-	12	-
14.	Semarang Utara	1.113	65	24
15.	Tembalang	-	-	47
16.	Tugu	204	569	29
Jumlah		1.404	678	678

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021

Dari data di atas, menunjukkan bahwa nelayan terbanyak berada di Kecamatan Semarang Utara. Di Kecamatan Semarang Utara terdapat sebuah dukuh yang memiliki potensi yang besar, yaitu Dukuh Tambakrejo. Potensi besar yang

dimiliki oleh masyarakat Dukuh Tambakrejo adalah laut yang letaknya tidak jauh dari sekitar Tambakrejo.

Tambakrejo merupakan sebuah dukuh yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas dengan jumlah warga sekitar 416 jiwa. Masyarakat di Dukuh Tambakrejo umumnya bekerja sebagai nelayan, namun tidak sedikit juga yang bekerja di sektor pengolahan ikan. Para istri-istri nelayan banyak yang membuka usaha pembuatan terasi dari udang. Penghasilan masyarakat Dukuh Tambakrejo masih jauh dari kata cukup. Kebutuhan sandang sudah seperti kebutuhan sekunder sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan saja responden mengalami kesulitan akibat himpitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan yang ada di Dukuh Tambakrejo. Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di Dukuh Tambakrejo yang berkaitan dengan perikanan tangkap, antara lain yaitu nelayan di Dukuh Tambakrejo masih menggunakan alat tangkap sederhana, sehingga hasil tangkapan yang dihasilkan juga belum maksimal. Dengan alat tangkap yang masih sederhana dan hanya menggunakan kapal berukuran kecil, membuat nelayan di Dukuh Tambakrejo mengalami keterbatasan dalam menangkap ikan. Masalah lain yang dihadapi yaitu keterampilan nelayan di Dukuh Tambakrejo juga masih rendah. Dalam Jurnal Intervensi Sosial : Teori dan Praktek yang ditulis oleh Dr. Lynn Minnaert yang berjudul "Turis Sebagai Bentuk Intervensi Sosial: Pusat Partisipasi Wisata di Flanders

menjelaskan bahwa wisata sosial merupakan salah satu bentuk dari intervensi sosial. Dengan adanya wisata sosial dapat memberikan efek positif pada berbagai aspek harian kehidupan para pekerja tersebut. Adapun efek yang ditimbulkan setelah para pekerja tersebut melakukan liburan adalah sebagai berikut :

1. Membangun relasi
2. Sikap dalam hidup
3. Kekuatan mental
4. Transportasi umum

Dari jurnal di atas, mirip sekali dengan kondisi yang ada di Dukuh Tambakrejo, di mana warga Dukuh Tambakrejo sangat perlu diberikan intervensi sosial oleh Pemerintah setempat. Jika para karyawan di Flanders mampu bekerja lebih baik setelah diberikan liburan sebagai bentuk intervensi sosial, maka begitupun dengan warga yang ada di Dukuh Tambakrejo. Warga di Dukuh Tambakrejo dapat diberikan intervensi sosial dengan bentuk program – program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Dukuh Tambakrejo. Karena pada dasarnya, masyarakat Dukuh Tambakrejo memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, yaitu kekayaan laut dengan hasilnya yang melimpah.

Guna menyelesaikan permasalahan di Dukuh Tambakrejo, maka Pemerintah Kota Semarang menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang untuk memberikan intervensi sosial melalui program Pengembangan Perikanan Tangkap. Untuk melihat apakah intervensi sosial yang diberikan sudah memberikan hasil yang positif dan

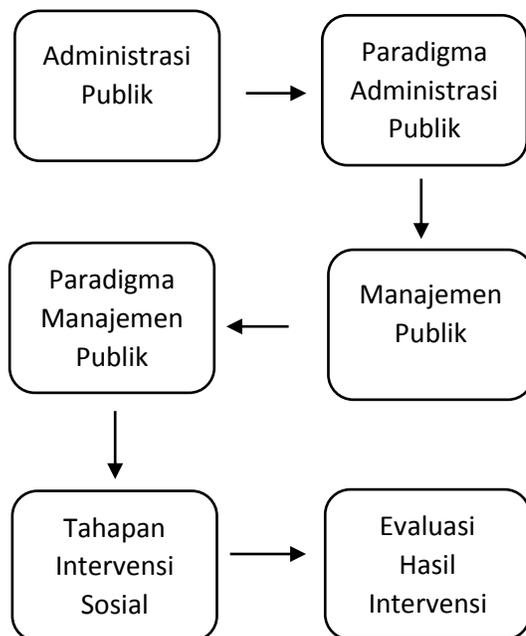
sesuai dengan tahapan pelaksanaannya, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi.

## B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai evaluasi tahapan intervensi sosial dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap di Dukuh Tambakrejo Kota Semarang adalah:

1. Mengetahui bentuk intervensi sosial yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat Dukuh Tambakrejo.
2. Mengetahui tahapan pelaksanaan intervensi sosial guna menghasilkan kinerja program yang baik.
3. Mengetahui hasil dari pelaksanaan intervensi sosial yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang terhadap masyarakat Dukuh Tambakrejo.

## C. TEORI



## C.1 Definisi Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Felix A Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) dalam Inu Kencana Syafie (2006:25) mendefinisikan administrasi publik adalah :

1. (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagai dari proses politik.
4. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

## **C.2 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry (1988:33-54) dalam Inu Kencana Syafie (2006:28), mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu :

1. Paradigma Pertama, Paradigma dikotomi antara Politik Administrasi (1900-1926).
2. Paradigma kedua, Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937).
3. Paradigma ketiga, Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).
4. Paradigma keempat, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970).
5. Paradigma kelima, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970-sekarang).

## **C.3 Manajemen Publik**

Donovan dan Jackson (1991:11-12) dalam Pasolong (2014:82), mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkaian tugas.

## **C.4 Paradigma Manajemen Publik**

Menurut Chung & Megginson, (1981) dalam Pasolong (2014:84), perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh beberapa pandangan, yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, manajemen strategik, dan manajemen publik.

## **C.5 Tahap Pelaksanaan Intervensi Sosial**

Menurut Adi. I.R (2005:141-150) Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan 'perubahan terencana' agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Sedangkan menurut Pincus dan Minahan (1973:101-117) dalam *Social Work Journal* (2014:187), intervensi sosial meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penggalan Masalah
2. Pengumpulan Data
3. Melakukan Kontak Awal
4. Negosiasi Kontrak
5. Membentuk Sistem Aksi
6. Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi
7. Memberikan Pengaruh
8. Terminasi

## **C.6 Tahap Evaluasi Kebijakan**

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Schuman dalam Winarno (2012: 233-234). Schuman mengungkapkan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat

- dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

### **C.7 Indikator Evaluasi Kebijakan**

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Dunn, 2000:608). Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indicator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indicator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn dalam Subarsono (2013:126) mencakup lima indikator, antara lain efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem snowball sampling. Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

### **E. PEMBAHASAN**

Adapun pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini antara lain bentuk intervensi sosial, tahapan pelaksanaan intervensi sosial, dan hasil dari pelaksanaan intervensi sosial yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat Dukuh Tambakrejo.

#### **1. Bentuk Intervensi Sosial Yang Diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Kepada Masyarakat Dukuh Tambakrejo**

Sebuah intervensi sosial yang diberikan sebagai upaya perubahan tentu diberikan melalui kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari program kerja yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk dari intervensi sosial. Adapun kegiatan yang diberikan dalam pelaksanaan intervensi sosial yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat Dukuh Tambakrejo antara lain seperti pelatihan dalam rangka peningkatan pendapatan, pembentukan Pokmaswas, pengiriman beberapa nelayan di tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan SDM seperti perbaikan mesin kapal dan sarana prasarana lainnya, pembuatan rumpon (rumah ikan), pembuatan sabuk pantai, bantuan jaring, kapal, dan alat tangkap lainnya melalui dana PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan), sosialisasi peminjaman modal dari Bank BPD Jateng, pembinaan untuk menabung, dan pembuatan asuransi.

Dalam pelaksanaannya, suatu kegiatan pasti memiliki kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah masalah cuaca atau musim yang tidak menentu, SDM nelayan yang masih rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan program yang diberikan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaan intervensi sosial, namun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang juga diuntungkan dengan beberapa faktor pendorong yang ada. Faktor pendorong tersebut ialah faktor turun-temurun untuk bekerja di laut, adanya bantuan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan intervensi sosial, dan yang ketiga adalah tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Sehingga masyarakat nelayan menjadi termotivasi dalam menerima program.

## **2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan Intervensi Sosial Yang Diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

Tahapan pelaksanaan intervensi sosial terdiri dari penggalan masalah, pengumpulan data, melakukan kontak awal, negosiasi kontrak, membentuk sistem aksi, menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi, memberikan pengaruh, dan terminasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a) Tahap Penggalan Masalah**

Dalam tahap ini, permasalahan yang ada di Dukuh Tambakrejo ialah alat tangkap nelayan yang digunakan masih

tradisional, kurangnya keterampilan yang dimiliki para nelayan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat Dukuh Tambakrejo juga hidup dalam lingkungan yang masih kumuh. Hal tersebut disebabkan karena rob yang sering melanda di wilayah tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan di bidang perikanan tangkap, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memberikan intervensi sosial melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang ditujukan kepada masyarakat nelayan yang ada di Kota Semarang, khususnya di Dukuh Tambakrejo. Adapun tujuan dari pemberian intervensi sosial ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan nelayan mengenai alat tangkap apa yang boleh dan tidak boleh digunakan. Di dalam pelaksanaan intervensi sosial tentu terdapat strategi yang akan digunakan. Adapun strategi yang diterapkan dalam intervensi sosial ini adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM para nelayan. Dalam tahap ini intervensi sosial yang diberikan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dukuh Tambakrejo. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu dari segi pengawasan, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Padahal tujuan dari pemberian intervensi sosial ini salah satunya untuk memberikan pemahaman tentang alat tangkap yang ramah lingkungan.

### **b) Tahap Pengumpulan Data**

Di dalam tahap pengumpulan data, sumber data yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang berasal dari produksi di TPI, produksi kelompok nelayan, dan jumlah nelayan yang ada di Kota Semarang. Data tersebut diperoleh Dinas dengan cara survey yang dilakukan kepada sejumlah nelayan yang dijadikan sampel yang ada di Kota Semarang. Dengan menggunakan cara survey itulah maka data yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang masih diragukan kevaliditasannya, karena data yang diperoleh hanya berasal dari sejumlah sampel yang mewakili seluruh jumlah nelayan yang ada. Jadi, dalam tahap ini dinilai masih kurang.

### **c) Tahap Melakukan Kontak Awal**

Untuk melakukan kontak awal, maka Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pertemuan dengan para stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan intervensi sosial. Pertemuan dengan stakeholder ini dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Tujuan diadakan pertemuan ini adalah untuk membahas pelaksanaan intervensi sosial terkait waktu pelaksanaan, kegiatan yang akan diberikan, sampai pada penerima dari intervensi sosial ini. Dengan adanya pertemuan diantara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang tentunya akan lebih memudahkan pelaksanaan intervensi sosial kedepannya. Jadi, dalam tahap ini dinilai sudah tepat.

### **d) Tahap Negosiasi Kontrak**

Dalam tahap negosiasi kontrak dibahas mengenai kesepakatan diantara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat Dukuh Tambakrejo. Kesepakatan diantara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang merupakan kesepakatan yang tidak tertulis. Kesanggupan masyarakat nelayan untuk terlibat dalam program sudah disampaikan saat rapat koordinasi. Dalam tahap ini dinilai masih kurang, karena seharusnya saat pelaksanaan rapat koordinasi, tentulah terdapat tawar-menawar diantara kedua pihak sampai berujung pada suatu kesepakatan. Seharusnya saat terjadi kesepakatan ini pasti sudah ada bentuk tertulis yang disetujui kedua belah pihak.

### **e) Tahap Membentuk Sistem Aksi**

Sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan intervensi sosial adalah dengan cara pembinaan dan penyuluhan. Dalam proses perumusannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang juga menampung aspirasi nelayan dan DPR untuk dimasukkan ke dalam program. Adapun dalam tahap ini juga memuat tentang waktu pelaksanaan intervensi sosial tersebut. Intervensi sosial yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pertama kali diberikan pada tahun 2000. Intervensi tersebut diberikan karena pada saat itu nelayan di Dukuh Tambakrejo sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dalam tahap ini dinilai sudah sesuai, karena sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan intervensi sosial sesuai dengan karakteristik masyarakat Dukuh Tambakrejo. Selain

itu kontribusi masyarakat Dukuh Tambakrejo dan pihak DPR juga sangat membantu dalam proses perumusan program.

#### **f) Tahap Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi**

Di dalam tahap menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi memuat tentang pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan intervensi sosial. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi sosial adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat nelayan. Untuk menjaga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi sosial ini. Dalam tahap ini dinilai sudah sesuai, karena dalam pelaksanaan intervensi sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang telah melibatkan pihak-pihak lain guna memudahkan pelaksanaan intervensi sosial. Selain itu, dengan adanya rapat koordinasi, maka komunikasi diantara pihak-pihak tersebut juga akan menjadi lebih baik.

#### **g) Tahap Memberikan Pengaruh**

Guna mempengaruhi nelayan agar melaksanakan program dengan baik, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memotivasi mereka guna meningkatkan semangat masyarakat Dukuh Tambakrejo dalam bekerja. Terbukti dengan adanya motivasi yang diberikan, maka produksi perikanan masyarakat Dukuh Tambakrejo

mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada peningkatan produksi perikanan sebesar 5 persen per tahun. Dalam tahap ini dinilai sudah sesuai, karena dengan adanya motivasi yang diberikan, maka semangat masyarakat Dukuh Tambakrejo dalam bekerja juga meningkat.

#### **h) Tahap Terminasi**

Untuk melakukan tahap terminasi tentu harus melihat pada pencapaian hasil dari intervensi yang diberikan. Adapun dalam pelaksanaan intervensi sosial ini, pencapaian pembangunan fisik sudah mencapai target seratus persen, namun pencapaian anggaran masih belum sepenuhnya mencapai target. Karena realisasi dana yang diturunkan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Namun walaupun intervensi sosial yang diberikan sudah mencapai target, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang belum bisa mengakhiri bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan, karena program yang diberikan belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan di Dukuh Tambakrejo dan masih ada nelayan yang belum memanfaatkan program yang diberikan dengan baik. Sehingga dalam tahap terminasi dinilai masih kurang.

### **3. Hasil Pelaksanaan Intervensi Sosial Yang Diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Terhadap Kondisi Masyarakat Dukuh Tambakrejo**

Seorang pekerja sosial yang memberikan intervensi sosial kepada sasaran perubahan, tentu saja

menghendaki adanya hasil yang positif bagi masyarakat penerima intervensi sosial tersebut. Begitu juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Adapun hasil dari intervensi sosial yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat Dukuh Tambakrejo diantaranya adalah kesadaran akan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kesadaran akan keselamatan kerja di laut, peningkatan keterampilan nelayan, dan peningkatan produksi perikanan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Walaupun intervensi sosial yang diberikan sudah memberikan hasil yang positif, namun intervensi sosial yang diberikan belum mampu menyelesaikan seluruh masalah di Dukuh Tambakrejo, hanya saja untuk masalah perikanan tangkap dapat diselesaikan dengan baik.

#### **4. Evaluasi Tahap Pelaksanaan Intervensi Sosial**

##### **a) Mengidentifikasi Tujuan Program Yang akan Dievaluasi**

Adapun tujuan dari pelaksanaan intervensi sosial melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mengenai alat tangkap yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan.

##### **b) Analisis Terhadap Masalah**

Alat tangkap yang masih tradisional, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Tambakrejo, kurangnya keterampilan nelayan, dan kurangnya

pemahaman tentang alat tangkap yang ramah lingkungan.

##### **c) Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan**

Kegiatan yang diberikan dalam pelaksanaan intervensi sosial adalah pelatihan dalam rangka peningkatan pendapatan, pembentukan Pokmaswas, pengiriman beberapa nelayan di tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan SDM, pembuatan rumpon, dan lain-lain.

##### **d) Pengukuran Terhadap Tingkatan Perubahan Yang Terjadi**

Tingkat perubahan masyarakat Dukuh Tambakrejo dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan, peningkatan keterampilan nelayan, kesadaran akan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kesadaran akan keselamatan kerja di laut, dan masih banyak lagi.

##### **e) Menentukan Apakah Perubahan Yang Diamati Merupakan Akibat Dari Kegiatan tersebut Atau Karena Penyebab Lain**

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Dukuh Tambakrejo tentu merupakan akibat dari kegiatan intervensi sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada tumbuhnya kesadaran nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Walaupun belum semua nelayan memiliki kesadaran, namun setidaknya mulai ada perubahan baik yang ditimbulkan dari kegiatan intervensi sosial yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

**f) Beberapa Indikator Untuk Menentukan Keberadaan Suatu Dampak**

Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak dalam pelaksanaan intervensi sosial dapat dilihat dari kesadaran untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, kesadaran akan keselamatan kerja di laut, peningkatan keterampilan nelayan, dan peningkatan produksi perikanan juga dapat dijadikan acuan indikator keberadaan suatu dampak.

**5. Indikator Evaluasi Kebijakan**

**a) Efektivitas**

Hasil dari intervensi sosial yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang setidaknya mampu menyelesaikan beberapa permasalahan walaupun belum secara sempurna. Namun untuk permasalahan terkait perikanan tangkap mampu diselesaikan dengan baik.

**b) Kecukupan**

Belum semua permasalahan dapat terselesaikan. Namun dengan adanya intervensi sosial yang diberikan melalui Program Pengembangan Perikanan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di Dukuh Tambakrejo. Sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan perikanan tangkap dapat diselesaikan dengan baik.

**c) Pemerataan**

Biaya yang didistribusikan tentu merata. Contohnya seperti bantuan dana PUMP. Dana PUMP yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung dikirimkan melalui rekening kelompok nelayan. Jadi setiap kelompok nelayan

mendapatkan jumlah bantuan dana yang sama besarnya. Manfaat yang didistribusikan juga merata, karena Program Pengembangan Perikanan Tangkap diberikan kepada seluruh nelayan yang ada di Kota Semarang.

**d) Responsivitas**

Masyarakat nelayan sangat puas dengan intervensi sosial yang diberikan, hanya saja masih ada beberapa yang belum memanfaatkan program yang diberikan secara maksimal.

**e) Ketepatan**

Hasil yang dicapai sangat bermanfaat. Contohnya sudah banyak nelayan yang mau merubah alat tangkapnya menjadi ramah lingkungan. Kesadaran akan pentingnya menabung dan keselamatan dalam bekerja juga sudah mulai diperhatikan.

**F. PENUTUP**

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intervensi sosial yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahap-tahapnya. Hanya saja dari semua tahap pelaksanaannya, masih ada tahap yang belum dilakukan, yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap pengakhiran kegiatan apabila bantuan yang diberikan dirasa sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam tahap terminasi juga harus disetujui oleh pihak penerima bantuan. Selain itu, intervensi sosial yang diberikan juga masih memiliki beberapa kekurangan

dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Adapun kekurangan tersebut yaitu:

#### 1. Tahap Penggalian Masalah

Salah satu tujuan intervensi sosial adalah memberikan pemahaman tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang masih kurang.

#### 2. Tahap Pengumpulan Data

Data yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang hanya dilakukan dengan melakukan sampel pada beberapa nelayan, sehingga data yang diperoleh diragukan kevaliditasannya.

#### 3. Tahap Negosiasi Kontrak

Kesepakatan dari kedua pihak adalah kesepakatan tidak tertulis. Padahal seharusnya saat melakukan rapat koordinasi dengan pihak yang terlibat, maka akan terjadi kesepakatan yang tertulis karena saat melakukan rapat ada pihak yang bertugas untuk mencatat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai.

#### 4. Tahap Terminasi

Intervensi sosial yang diberikan tidak mampu menyelesaikan seluruh masalah di Dukuh Tambakrejo. Namun, untuk masalah di bidang perikanan tangkap dapat diselesaikan dengan baik. Hanya masalah lingkungan yang belum bisa terselesaikan dengan baik.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan untuk menunjang pelaksanaan intervensi sosial di kemudian hari adalah:

1. Untuk memperbaiki tahap penggalian masalah maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah:
  - a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan di Dukuh Tambakrejo Kota Semarang dengan cara membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan di Dukuh Tambakrejo.
  - b) Memberi contoh dengan berkomitmen pada perumusan program kerja yang selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
  - c) Melakukan penanaman pohon bakau di pinggir sabuk pantai agar bisa menahan abrasi yang sering melanda.
  - d) Meningkatkan pengawasan dengan ketat dengan melibatkan pihak-pihak lain agar tidak ada lagi nelayan yang menggunakan alat tangkap berbahaya.
  - e) Memberikan sanksi kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap berbahaya agar menimbulkan efek jera.
2. Untuk memperbaiki tahap pengumpulan data maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah:

- a) Melibatkan kerja sama dengan pihak lain agar bisa mengumpulkan data secara akurat. Sehingga dalam proses pengumpulan data tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sampel.
3. Untuk memperbaiki tahap negosiasi kontrak maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah:
    - a) Menyusun perjanjian tertulis agar kesepakatan diantara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dengan masyarakat Dukuh Tambakrejo menjadi lebih kuat karena ada bukti yang mengikat.
  4. Untuk memperbaiki tahap terminasi maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah:
    - a) Menambah kegiatan-kegiatan baru dalam pelaksanaan intervensi sosial agar program yang diberikan bisa menyelesaikan permasalahan di Dukuh Tambakrejo sehingga tahap terminasi dapat terlaksanakan.
    - b) Melibatkan kerja sama dengan pihak swasta agar intervensi sosial yang diberikan dapat ditingkatkan kualitasnya.
    - c) Melakukan kolaborasi dengan pihak psikolog agar bisa merubah watak nelayan agar bisa memanfaatkan program yang diberikan secara maksimal.
    - d) Melakukan pendampingan secara intensif agar para nelayan

di Dukuh Tambakrejo merasa diperhatikan sehingga mereka bisa memanfaatkan program dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jakarta: FISIP UI Press
- Amin, Melisa Amalia; Krisnani, Hj Hetty; Irfan, Maulana. (2014). Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial: Journal of Social Worker Vol 4 No. 2
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Minnaert, Dr. Lynn. (2009). Tourism as a Form of Social Intervention: The Holiday Participation Centre in Flanders: Journal of Social Intervention: Theory and Practice Vol 18 Issue 3: 42-61
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta 8
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS
- Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021